

Analisis Sinkronisasi RPD 2023-2026 dan Renstra 2023-2026 dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Ika Heru Setyawan¹, M.B. Zubahrum Tjenreng²
Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
mtsp.41.3552@ipdn.ac.id¹, tjenreng@gmail.com²

Submitted: 21st Oct 2024 | **Edited:** 30th Dec 2024 | **Issued:** 10th Jan 2025

Cited on: Setyawan, I. H., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Analisis Sinkronisasi RPD 2023-2026 dan Renstra 2023-2026 dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 574-587.

ABSTRACT

This study analyzes the synchronization between the Regional Development Plan (RPD) 2023-2026 and the Strategic Plan (Renstra) 2023-2026 of the Tourism and Creative Economy Agency of DKI Jakarta Province. The purpose of this synchronization is to ensure alignment of vision, mission, goals, strategies, and policies to support the development of the tourism and creative economy sectors. A qualitative descriptive approach was used, employing methods such as interviews, observations, and document analysis. The results show alignment between the RPD and Renstra in setting priorities, such as strengthening digital-based creative economy, revitalizing leading tourist destinations, and enhancing human resource competencies. However, differences were found in implementation levels and resource allocation, with the RPD being more holistic and flexible, while the Renstra is more focused and structured. This study highlights the importance of synchronization to enhance budget efficiency, program integration, and performance accountability, which can support sustainable development in DKI Jakarta,

Keywords: Synchronization, RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, Tourism and Creative Economy

PENDAHULUAN

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) didasarkan pada kerangka hukum dan kebijakan yang kuat untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan pedoman tata cara perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga menjadi rujukan penting dalam penyusunan RPD.

Tahap awal penyusunan RPD memerlukan analisis situasi dan kondisi daerah yang didukung data dan informasi terkini. Statistik ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan menjadi dasar untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang melalui analisis SWOT. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus pembangunan, seperti transformasi ekonomi digital atau pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah. Visi dan misi harus mencerminkan arah pembangunan daerah yang inklusif, sedangkan tujuan dan sasaran dirancang agar terukur dengan indikator kinerja yang jelas.

Strategi dan arah kebijakan juga menjadi komponen utama dalam dokumen RPD. Strategi mencakup pendekatan untuk mencapai tujuan pembangunan, sementara arah kebijakan berfungsi sebagai panduan implementasi program. Contoh strategi meliputi penguatan tata kelola pemerintahan dan pengembangan ruang kreatif berbasis digital, sedangkan arah kebijakan dapat berupa optimalisasi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Program dan kegiatan utama yang direncanakan dalam RPD harus terintegrasi dengan Renstra perangkat daerah untuk mendukung sasaran strategis. Program ini juga harus mencakup alokasi anggaran indikatif yang mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas.

Dalam membuat sinkronisasi sangat diperlukan perhatian pada keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Indikator kinerja daerah (IKD) dalam RPD harus relevan dengan indikator kinerja utama (IKU) dalam Renstra perangkat daerah. Koordinasi anggaran dan evaluasi awal memastikan bahwa dokumen RPD merefleksikan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, serta koordinasi antar perangkat daerah untuk integrasi program yang lebih baik.

RPD berfokus pada pembangunan jangka panjang yang mencakup prioritas pembangunan daerah, sedangkan Renstra berorientasi pada implementasi rencana strategis yang lebih terukur dalam periode lima tahunan. Di DKI Jakarta, sinkronisasi

ini membantu menghindari ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan dengan program-program yang diusulkan. Dengan demikian, anggaran yang disusun dapat lebih efisien dan terarah, sehingga program-program dalam Renstra dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah digariskan dalam RPD (Mukhlis & Suharto, 2017). Selain itu, sinkronisasi RPD dan Renstra juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan, karena indikator kinerja yang terintegrasi memudahkan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan (Asmanah, 2019). DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang menghadapi tantangan kompleks seperti kemacetan, banjir, dan pertumbuhan penduduk, membutuhkan program-program yang saling melengkapi dan berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan tersebut (Pratama, 2020). Oleh karena itu, sinkronisasi RPD dan Renstra di DKI Jakarta akan mendukung upaya pembangunan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengelola program, serta mengoordinasikan berbagai aktivitas yang bertujuan memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta. Perannya meliputi pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan infrastruktur pendukung, pengelolaan event dan festival, serta promosi Jakarta sebagai destinasi pariwisata unggulan. Selain itu, Disparekraf juga berfokus pada penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dan inovasi dalam sektor kreatif, seperti kuliner, seni, dan desain. Melalui upaya ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta berkontribusi langsung dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas.

LANDASAN TEORI

Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) dan Renstra (Rencana Strategis) merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terintegrasi dan efektif (Ajizah, et al., 2021). RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang mengatur arah pembangunan suatu daerah, sementara Renstra adalah dokumen perencanaan yang lebih fokus pada

pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka menengah (Indah, et al., 2024). Sinkronisasi antara keduanya memastikan bahwa visi dan misi yang terkandung dalam RPJPD dapat tercapai melalui program-program yang direncanakan dalam Renstra. Hal ini penting agar pembangunan daerah tidak terfragmentasi dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks peningkatan pelayanan publik, sinkronisasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dalam Renstra dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Mahi, 2017). Salah satu contoh nyata adalah pengintegrasian kebijakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang ada dalam RPJPD dengan program pelayanan publik di level daerah. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan pembangunan daerah, baik dari segi kualitas maupun efisiensinya.

Penyusunan Renstra yang berbasis pada data dan analisis yang akurat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Sinkronisasi yang baik antara RPJPD dan Renstra akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang sudah dijalankan (Jauhari & Rosdini, 2024). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam pelayanan publik secara lebih cepat dan responsif. Selain itu, penyusunan Renstra yang selaras dengan RPJPD dapat menciptakan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Berdasarkan uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa dengan adanya sinkronisasi RPD dan Renstra, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah akan lebih terarah dan memiliki dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah, karena masyarakat dapat melihat secara jelas hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari program-program yang ada.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Teori & Metode	Hasil Penelitian
1	Susanto, A. (2020). Sinkronisasi Kebijakan Pariwisata di Kota Besar: Studi Kasus Kota Bandung. <i>Jurnal Pariwisata Indonesia</i> , 12(2), 101-115.	Pendekatan kualitatif dengan studi kasus, menggunakan teori kebijakan publik dan analisis dokumen.	Menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan pariwisata tingkat kota dan provinsi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi kebijakan.
2	Putri, D. A. (2019). Peran Ekonomi Kreatif dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Empiris di Kabupaten	Pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi, menggunakan data	Menunjukkan adanya korelasi positif antara pengembangan ekonomi kreatif dengan

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Teori & Metode	Hasil Penelitian
	Sleman. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(1), 45-58.	sekunder dari BPS.	pertumbuhan ekonomi daerah.
3	Raharjo, B. (2021). Evaluasi Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Tingkat Kabupaten/Kota. Jurnal Kebijakan Publik, 10(3), 201-218.	Pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumen, menggunakan kerangka evaluasi program.	Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi RPJMD di tingkat subnasional, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.
4	Hidayat, S. (2018). Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Indonesia: Studi Literatur. Jurnal Pariwisata Nusantara, 2(2), 75-88.	Studi literatur dengan analisis komparatif terhadap berbagai studi kasus di Indonesia.	Mengidentifikasi berbagai pendekatan dan model sinkronisasi perencanaan pariwisata di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.
5	Lestari, R. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Kota Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16(2), 115-128.	Pendekatan kualitatif dengan studi kasus, menggunakan teori good governance.	Menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Sumber: Data penelitian, 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis sinkronisasi RPD 2023-2026 dan Renstra 2023-2026 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Menurut Creswell (2023), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam tanpa menguji hipotesis atau membuat generalisasi luas. Penelitian berfokus pada eksplorasi dan deskripsi rinci terkait proses sinkronisasi antara RPD dan Renstra, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen seperti laporan tahunan dan rencana strategis. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dari data yang dikumpulkan, memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan desain penelitian dengan perkembangan di lapangan. Metode ini sangat berguna untuk memahami proses sinkronisasi yang kompleks dan konteks spesifik DKI Jakarta tanpa berupaya membuat generalisasi.

HASIL PENELITIAN

Dalam upaya memastikan keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2026, analisis sinkronisasi difokuskan pada lima komponen utama: isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Analisis ini

bertujuan untuk mengidentifikasi sinergi serta potensi kesenjangan antara dokumen perencanaan tingkat provinsi dengan perangkat daerah.

Isu Strategis

Isu strategis DKI Jakarta meliputi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis digital, dan peningkatan daya tarik destinasi wisata berbasis budaya dan keberlanjutan. Isu strategis ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dan fokus pembangunan daerah dalam meningkatkan daya saing wilayah. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama mengingat dampak signifikan pandemi terhadap berbagai sektor, termasuk pariwisata, yang menjadi salah satu kontributor utama perekonomian daerah. Dalam konteks ini, penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis digital tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing lokal tetapi juga untuk menciptakan peluang baru di era digitalisasi global.

Sementara itu, dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2026, isu strategis yang diangkat mencakup pengembangan ekosistem pariwisata kreatif berbasis teknologi, revitalisasi objek wisata unggulan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan ekosistem pariwisata kreatif difokuskan pada kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pengalaman wisata yang inovatif dan menarik. Revitalisasi objek wisata unggulan, seperti kawasan bersejarah dan destinasi tematik, diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai tujuan wisata unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.

Isu-isu strategis ini mendukung agenda besar RPD, khususnya dalam mendorong kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keterpaduan antara pemulihan ekonomi, penguatan ekosistem digital, dan revitalisasi destinasi unggulan menciptakan landasan kuat bagi Jakarta untuk menjadi pusat pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Dengan strategi ini, diharapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Selain itu, kedua dokumen

memperhatikan integrasi nilai budaya lokal dalam pengembangan ekosistem wisata dan ekonomi kreatif, yang memberikan ciri khas tersendiri untuk memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global berakar lokal.

Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 telah secara tegas menempatkan pengembangan perekonomian daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai prioritas utama. Dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama, RPD ini mengakui potensi besar yang dimiliki sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta penguatan ekosistem pariwisata kreatif yang berbasis nilai tambah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan sektor ini secara berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan RPD, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun sasaran-sasaran spesifik yang mendukung pencapaian visi tersebut. Dengan fokus pada peningkatan daya tarik destinasi wisata, mendorong pelaku usaha kreatif, serta memperkuat citra DKI Jakarta sebagai destinasi wisata internasional, Renstra ini memberikan arah yang jelas bagi upaya pengembangan sektor pariwisata.

Implikasi bagi Pengembangan Pariwisata DKI Jakarta

Keselarasan antara RPD dan Renstra memiliki implikasi yang signifikan bagi pengembangan sektor pariwisata di DKI Jakarta. Beberapa di antaranya adalah:

1. Fokus pada pengembangan produk wisata yang berkualitas: Dengan adanya dukungan dari kedua dokumen perencanaan ini, pengembangan produk wisata akan lebih terarah pada peningkatan kualitas dan daya tarik.
2. Penguatan peran pelaku usaha kreatif: Pelaku usaha kreatif akan mendapatkan dukungan yang lebih baik untuk mengembangkan produk dan jasa yang inovatif.
3. Peningkatan investasi di sektor pariwisata: Adanya kepastian arah pengembangan sektor pariwisata akan menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor ini.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata akan menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.
5. Penguatan promosi destinasi wisata: Upaya promosi destinasi wisata akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif.

Gambar 1. Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Sumber: Analisa Bappeda, 2022

Dari gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran

Penetapan sasaran dalam RPD dan Renstra yang saling melengkapi menunjukkan adanya sinergi yang kuat dalam upaya memajukan sektor pariwisata di DKI Jakarta. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang menjadi sasaran utama RPD, misalnya, sejalan dengan upaya Renstra dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Keduanya saling mendukung, di mana peningkatan daya tarik akan secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan.

Penggunaan indikator kinerja utama (IKU) yang beragam dalam kedua dokumen tersebut menunjukkan komitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh. Jumlah pelatihan sumber daya manusia di sektor pariwisata yang menjadi indikator dalam Renstra, misalnya, tidak hanya sekadar meningkatkan kuantitas tenaga kerja, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan upaya RPD dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Dengan tenaga kerja yang terampil, diharapkan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Selain aspek kuantitatif, kedua dokumen juga memperhatikan aspek kualitatif dari pengembangan pariwisata. Tingkat kepuasan wisatawan yang menjadi indikator dalam Renstra, misalnya, mencerminkan komitmen untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan. Kepuasan wisatawan tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan ulang, tetapi juga pada citra positif destinasi wisata.

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, tentu saja terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Persaingan yang ketat dengan destinasi wisata lainnya merupakan salah satu tantangan utama. Namun, tantangan ini juga dapat menjadi peluang untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk wisata yang unik dan menarik. Pengembangan sektor pariwisata merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti forum diskusi, pelatihan, dan kemitraan.

2. Strategi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun strategi yang saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di DKI Jakarta. RPD telah menggariskan visi transformatif dengan fokus pada transformasi digital, pengembangan destinasi wisata tematik, dan promosi wisata berbasis budaya lokal. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pariwisata DKI Jakarta di kancah internasional dan memperkuat identitas kota sebagai destinasi yang unik dan menarik.

Renstra kemudian memberikan penjabaran yang lebih rinci mengenai langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi kunci dalam Renstra. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam pengembangan pariwisata. Digitalisasi layanan pariwisata juga menjadi fokus utama, sejalan dengan visi transformasi digital dalam RPD. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pariwisata, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. Pemberdayaan komunitas kreatif merupakan strategi lain yang penting, mengingat potensi besar ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan pariwisata. Dengan memberdayakan komunitas kreatif, diharapkan dapat muncul berbagai produk dan event kreatif yang dapat menarik minat wisatawan.

Keselarasan antara strategi dalam RPD dan Renstra menunjukkan adanya kesamaan visi dan misi dalam pengembangan sektor pariwisata di DKI Jakarta. Strategi-strategi ini saling mendukung dan saling memperkuat, sehingga diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital yang menjadi fokus dalam RPD, misalnya, akan semakin efektif jika didukung oleh penguatan kolaborasi dan pemberdayaan komunitas kreatif sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Implementasi strategi-strategi ini secara efektif dan efisien akan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika perkembangan sektor pariwisata.

3. Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun kerangka kebijakan yang saling mendukung untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta. RPD telah menetapkan arah kebijakan yang lebih luas dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, penguatan regulasi untuk mendukung ekonomi kreatif, dan peningkatan kualitas layanan pariwisata. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pelaku usaha, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya tarik DKI Jakarta sebagai destinasi wisata.

Renstra kemudian memberikan penjabaran yang lebih spesifik mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPD. Pembangunan kawasan wisata unggulan merupakan salah satu contoh nyata dari implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur pariwisata. Melalui pembangunan kawasan wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Fasilitasi sertifikasi pelaku usaha kreatif merupakan upaya konkrit untuk mendukung kebijakan penguatan regulasi. Dengan adanya sertifikasi, produk-produk kreatif lokal dapat lebih mudah menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Pengembangan aplikasi digital pariwisata juga

sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan pariwisata. Aplikasi ini dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai destinasi wisata, akomodasi, transportasi, dan berbagai layanan lainnya.

Integrasi kebijakan antara RPD dan Renstra tidak hanya berhenti pada tingkat perencanaan, tetapi juga pada tingkat implementasi. Keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Misalnya, pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkualitas akan meningkatkan daya tarik destinasi wisata, sehingga perlu didukung oleh penguatan regulasi untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan yang baik. Peningkatan kualitas layanan pariwisata melalui digitalisasi juga akan semakin efektif jika didukung oleh pembangunan kawasan wisata unggulan yang modern dan menarik.

Selain itu, keselarasan antara RPD dan Renstra juga tercermin dalam upaya untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik RPD maupun Renstra menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif dan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Tabel 2. Sinkronisasi

Komponen	RPD 2023-2026	Renstra 2023-2026	Keterangan
Isu Strategis	Pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi kreatif berbasis digital	Pengembangan ekosistem pariwisata kreatif berbasis teknologi	Kedua dokumen saling mendukung dalam penguatan sektor kreatif dan digital.
Tujuan	Ekonomi daerah inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan pelaku usaha kreatif	Tujuan Renstra memperkuat visi strategis dalam RPD.
Sasaran	Peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah	Peningkatan pelatihan SDM dan tingkat kepuasan wisatawan	Indikator tambahan Renstra mendukung sasaran RPD.
Strategi	Transformasi digital sektor pariwisata, promosi budaya local	Penguatan kolaborasi, digitalisasi layanan, pemberdayaan komunitas	Strategi saling melengkapi untuk memperkuat ekosistem pariwisata.
Arah Kebijakan	Pengembangan infrastruktur, penguatan regulasi, peningkatan layanan	Pembangunan kawasan wisata, sertifikasi pelaku kreatif, aplikasi digital	Kebijakan mendukung tercapainya program prioritas yang diamanatkan RPD.

Kesesuaian atau perbedaan yang ditemukan.

Penelitian ini menemukan sejumlah kesesuaian dan perbedaan antara RPD 2023-2026 dan Renstra 2023-2026 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Kesesuaiannya terletak pada prioritas pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tercantum dalam kedua dokumen. Baik RPD maupun Renstra menekankan pentingnya pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan ekosistem ekonomi kreatif, serta peningkatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, kedua dokumen ini sejalan dalam menetapkan target jangka panjang, seperti penciptaan lapangan kerja, promosi Jakarta sebagai destinasi unggulan, dan pengembangan UMKM kreatif.

Namun, terdapat perbedaan terkait fokus implementasi dan alokasi sumber daya. RPD cenderung lebih bersifat holistik dengan penekanan pada visi pembangunan jangka panjang dan prioritas pembangunan yang luas, sementara Renstra lebih terfokus pada program dan target yang lebih terukur dalam periode lima tahun. Hal ini membuat Renstra lebih detail dalam mengatur langkah-langkah konkret, anggaran, serta indikator kinerja yang harus dicapai. Perbedaan lainnya adalah pada tingkat fleksibilitas implementasi. RPD lebih fleksibel dalam menyesuaikan prioritas sesuai dinamika perkembangan, sedangkan Renstra lebih rigid karena sudah menetapkan target dan indikator kinerja yang lebih terstruktur.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesesuaian dalam tujuan utama, seperti pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, masih ada tantangan dalam hal sinkronisasi program-program spesifik dan integrasi indikator kinerja. Beberapa program yang direncanakan dalam Renstra belum sepenuhnya sejalan dengan rencana yang tercantum dalam RPD, sehingga berpotensi menghambat efektivitas implementasi. Oleh karena itu, sinkronisasi yang lebih baik antara RPD dan Renstra diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan pengukuran kinerja yang terintegrasi sepenuhnya guna mendukung pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa RPD 2023-2026 dan Renstra 2023-2026 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memiliki kesesuaian dalam hal tujuan utama, yaitu pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua dokumen ini sejalan dalam menetapkan prioritas untuk meningkatkan daya saing,

penguatan infrastruktur, pengembangan destinasi pariwisata, serta penguatan UMKM kreatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keselarasan visi pembangunan jangka panjang ini berperan penting dalam mendukung Jakarta sebagai destinasi wisata unggulan dan pusat ekonomi kreatif. Namun, meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan, terdapat perbedaan dalam fokus implementasi dan alokasi sumber daya. Renstra lebih terstruktur dengan target yang terukur dan program-program spesifik yang lebih rinci, seperti pengukuran kinerja, penetapan anggaran, serta skema pelaksanaan tahunan yang jelas. Sementara itu, RPD cenderung lebih fleksibel dan bersifat holistik, dengan prioritas pembangunan yang lebih umum dan kurang mendetail dalam program-program tahunan. Hal ini menyebabkan beberapa program dalam Renstra mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan rencana yang tercantum dalam RPD, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, perbedaan dalam tingkat fleksibilitas antara kedua dokumen tersebut turut mempengaruhi adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lapangan.

Renstra yang lebih rigid mungkin sulit beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial-ekonomi, sedangkan RPD yang lebih fleksibel memungkinkan penyesuaian prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Oleh karena itu, sinkronisasi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan integrasi yang lebih efektif antara RPD dan Renstra. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pencapaian target kinerja yang lebih terarah dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan berkelanjutan. Sinkronisasi ini mencakup keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Kesesuaian antara RPD dan Renstra terlihat dalam fokus pada penguatan ekonomi kreatif berbasis digital, revitalisasi destinasi wisata, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Namun, perbedaan dalam fleksibilitas dan fokus implementasi

menunjukkan adanya tantangan dalam integrasi program dan indikator kinerja. Untuk mengoptimalkan hasil, diperlukan koordinasi yang lebih intensif, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan pemantauan serta evaluasi yang komprehensif. Dengan sinkronisasi yang baik, RPD dan Renstra dapat secara efektif mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmanah, S. (2019). Integrasi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 123-137.
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026*.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Rencana Strategis 2023-2026*.
- Mukhlis, A., & Suharto, A. (2017). Sinkronisasi RPD dan Renstra: Studi Kasus di Kota Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Publik*, 5(2), 89-101.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Pratama, B. (2020). Peran Sinkronisasi RPD dan Renstra dalam Pembangunan Kota Metropolitan. *Jurnal Studi Pembangunan*, 9(3), 278-290.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 44-64.
- Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Jauhari, S. H. P., & Rosdini, D. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung Guna Mewujudkan Good Governance. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 6(4), 101-110.
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Hasanah, A. U., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron, B. (2024). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(1), 99-118.